BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKAPEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Pohan dalam Prastowo (2012: 81) penyusunan kajian pustaka bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain. Kajian ini dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk suaplagiat.

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Dwi Ratmono & Mahfud Sholihin (2017:6) definisi dari Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

> "Seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pentausahaaan, pelaporan ,pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah".

Menurut Baldric Siregar (2017:12) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

> "Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah".

Dadang Suwanda dan Hendri Santosa (2014:17) Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan sebagai berikut :

> "Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah".

Sedangkan menurut Abdul Halim (2007:137) mengemukakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

> "Pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah".

Dalam Peraturan Menteri Negeri 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa :

> "Pengguna anggaran/kuasa anggaran , bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan".

Dari definisi-defenisi yang telah dipaparkan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang berkaitan dengan APBD.

2.1.1.2 Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun indikator Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017:6) :

1. " Perencanaan
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
4. Pengawasan"

Dari indikator diatas penjelasannya sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengelolaan keuangan Daerah

   Yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah :
   a. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
   b. Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

   Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

   Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa a). Laporan Realisasi Anggaran b). Neraca c). Laporan Arus Kas dan d). Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebelum dilaporkan.

4. Pengawasan

   Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

2.1.2 Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

2.1.2.1 Pengertian Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Adapun pengertian dari kualitas menurut Iman Mulyana (2010 : 96) adalah Kesesuaian dengan standar diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.

Sedangkan pengertian aparatur pemerintah menurut Dharma Setyawan Salam (2004 : 169) adalah sebagai berikut :

> “Pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku”.

Pengertian aparatur pemerintah daerah menurut Koswara (2001 : 259) menyatakan bahwa :

> "Seluruh perangkat Daerah yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan, termasuk PNS pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah".

Berdasarkan pengertian diatas, kualitas aparatur pemerintah daerah merupakan semua pegawai yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah pada unit organisasi pemerintah daerah mulai dari pemerintahan tertinggi di kabupaten/kota hingga tingkat desa/kabupaten.

2.1.2.2 Ukuran Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Setiap satuan kerja pemerintah daerah harus memiliki aparatur yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Sedangkan menurut Sofyandi (2013:113) ukuran kualitas aparatur pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

> Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu program yang diharapkan dapat memberikan rangsangan/stimulasi kepada seseorang untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu dan memperoleh pengetahuan umum dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja dan organisasi.

Menurut Racmawati (2008:117) ukuran kualitas aparatur pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Formal

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Pendidikan dan pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan adalah unsur sentral dalam pengembangan pegawai. Pelatihan dalam bentuk yang kompleks diberikan untuk membantu pegawai mempelajari keterampilan yang akan meningkatkan kinerja mereka di mana akan membantu perusahaan atau organisasi mencapai sasaran.

2.1.2.3 Komponen Aparatur Pemerintah Daerah

Menurut Soeprapto (2010 : 29) Kompnen Aparatur Pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Keterampilan dan keahlian
2. Wawasan dan pengetahuan
3. Bakat dan potensi
4. Kepribadian dan Motif Kerja
5. Moral dan Etos

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2015:19) menyatakan Laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

> "Merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu sesuai kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 24 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan".

Menurut Baldric Siregar (2015:12) mendefinisikan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

> "Hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut".

Menurut V.Wiratna Sujarweni (2017:1) menyatakan bahwa Laporan keuangan adalah :

> "Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan".

Menurut Deddi Nordiawan (2012:151) menyatakan laporan keuangan merupakan :

> "Bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas".

2.1.3.2 Karakteristik Laporan Keuangan

Baldric Siregar (2017) menyatakan bahwa Karakteristik Kualitatif Laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Menurut Baldric (2017: 112) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat Dipahami

Berikut ini adalah penjelasan karakteristik kualitatif laporan keuangan :

1. Relevan : Informasi yang memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, disajikan tepat waktu dan lengkap
2. Andal : Informasi yang dusajikan jujur dapat diverifikasi dan netral
3. Dapat dibandingkan : laporan keuangan dapat dibandinngkan antar – periode dan antar unit pemerintahan
4. Dapat dipahami : Informasi yang dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang dapat dipahami oleh pengguna.

Sedangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Dwi Ratmono (2017 : 15) adalah :

1. “Relevan
2. Andal
3. Dapat dibanding
4. Dapat dipahami”

Penjelasan karakteristik kualitatif laporan keuangan :

1. Relevan

   Relevan mengandung pengertian bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya yaitu :
   a) Laporan keuangan memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya *(feedback value)*
   b) Laporan keuangan memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memprediksi masa yang akan datang *(predictive value)*
   c) Laporan keuangan disajikan tepat waktu (timeliness) sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan.
   d) Penyajian laporan keuangan memuat informasi yang selengkap mungkin (completness)

2. Andal

   Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, dapat diverifikasi dan netral.
   1. Jujur artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
   2. Dapat diverifikasi artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap mempunyai kesimpulan yang sama.
   3. Netral artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umumdan tidak bisa pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

   Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lainnya dengan syarat menetapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi periode sebelumnya, maka perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

4. Dapat dipahami

   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna laporan.

2.1.3.3 Tujuan Laporan keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah menurut Dwi Ratmono & Mahfud (2017:14) untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya :

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemda
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemda
c. Menyediakan informasi mengenai sumber , alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhdap anggarannnya
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggara kegiatan pemerintah
g. Menyediakan informasi berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut Baldric Siregar (2017 : 115) Tujuan Laporan Keuangan :

1. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk pembiayaan seluruh pengeluaran.
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil – hasil yang telah dicapai.
4. Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber – sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk ang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Dari pemaparan diatas menurut para ahli, maka dari itu penulis menggunakan karakteristik menurut Dwi Ratmono, (2017 : 15) yaitu Relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami sebagai tolak ukur kualitas laporan keuangan.

2.1.3.4 Pengguna Laporan Keuangan Daerah

Menurut Baldric Siregar (2017 : 109) pengguna Laporan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat
2. Wakil Rakyat
3. Lembaga Pengawas
4. Lembaga Pemeriksa
5. Donatur

6. Investor
7. Kreditor
8. Pemrintah
9. Pihak lain

Sedangkan menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017 : 9) sebagai berikut :

1. “Masyarakat
2. Para Wakil Rakyat (DPRD)
3. Lembaga Pemeriksa
4. Analis Pemeliti
5. Pihak yang memneri atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
6. Pemerintah Pusat
7. Pemerintah daerah lainnya”

Adapun penjelasan para pengguna laporan keuangan sebagai berikut :

1. Masyarakat

   Informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibutuhkan oleh masyarakat dalam menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang pendanaannya sebagian besar dari pembayaran pajak dan retribusi yang dilakukan oleh rakyat.

2. Para Wakil Rakyat (DPRD)

   Lembaga legislatif berkepentingan terhadap informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah dalam rangka mengawasi dan menjaga kesimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.

3. Lembaga Pemeriksa

   Lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkepentingan terhadap informasi akuntansi keuangan daerah untuk memeriksa dan memberikan opini apakah pemda dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

4. Analisis dan Peneliti

   Informasi yang dihasilkan dari pelaporan keuangan pemda biasanya diwujudkan dalam database Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) sangat diperlukan oleh analisis maupun peneliti yang digunakan untuk membuat analisis dan riset tentang berbagai hal yang terkait dengan kemampuan ekonomi suatu pemda.

5. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi , investasi, dan pinjaman
   Informasi keuangan daerah dipergunakan oleh pihak yang memberikan donasi untuk melihat apakah donasi yang diberikan sudah sesuai dengan tujuan peruntukan. Investor berkepentingan menggunakan informasi keuangan daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi terkait dengan investasi yang telah atau akan dilakukannya. Pihak yang akan memberikan pinjaman berkepentingan untuk menilai apakah entitas pemda mempunyai kapabilitas ekonomi untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan.

6. Pemerintah Pusat

   Pemerintah pusat memerlukan informasi pelaporan keuangan pemda untuk mengevaluasi pertanggungjawaban Kepala Daerah karena adanya desentralisasi dalam pengelolaan keuangan negara yang diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota selaku pengelola keuangan daerah.

7. Pemerintah Daerah Lainnya

   Sesuai dengan karakteristik utama struktur pemerintah seperti yang telah diuraikan di atas khususnya adanya transfer pendapatan antarpemerintah, maka pemda lain juga memerlukan informasi pelaporan keuangan pemda lainnya. Selain untuk kepentingan transfer pendapatan antarpemda, adanya kepentingan ekonomi lain seperti melakukan pinjaman juga menentukan arti pentingnya infomasi keuangan daerah.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Mahmudi (2007:27) menyatakan bahwa Pengelolaan merupakan bagian dari Sistem akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah dengan standar akuntansi yang merupakan pedoman yang mengatur bagaimana laporan keuangan tersebut seharusnya disajikan.

Abdul Halim dkk (2010:4) menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan negara dan daerah tidak lepas dari akuntansi sebagai bagian penting untuk pertanggungjawaban yang berbentuk sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan output dari akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik Dalam prosesnya memerlukan suatu sistem akuntansi karena laporan keuangan akan dibuat periodik atau berulang. Oleh sebab itu memahami sistem akuntansi menjadi sangat penting untuk dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2004 : 35) menyatakan bahwa Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk kualitas laporan keuangan, sehingga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan juga tidak baik.

Mahmudi (2007:27) menyatakan bahwa Kualitas dari hasil laporan keuangan tergantung pada pengelolaan keuangan daerah yang sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus pengelolaan pada setiap tahap, baik tahap perencanaan, implementasi maupun pelaporan.

Hal ini sejalan dengan penlitian Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Edy Sujana (2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, bahwa semakin efektif dan efisien dalam hal mengelola keuangan daerah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2.2 Pengaruh Kualitas Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Jones dan Pendlebury (2010) yang diterjemahkan oleh Dwi Ratmono dan Mahfud Solihin (2017 : 1) Pemerintah Daerah adalah Aparatur yang memadai akan menghasilkan dengan laporan keuangan yang baik sehingga dapat mempermudah para pengguna untuk pengambilan keputusan.

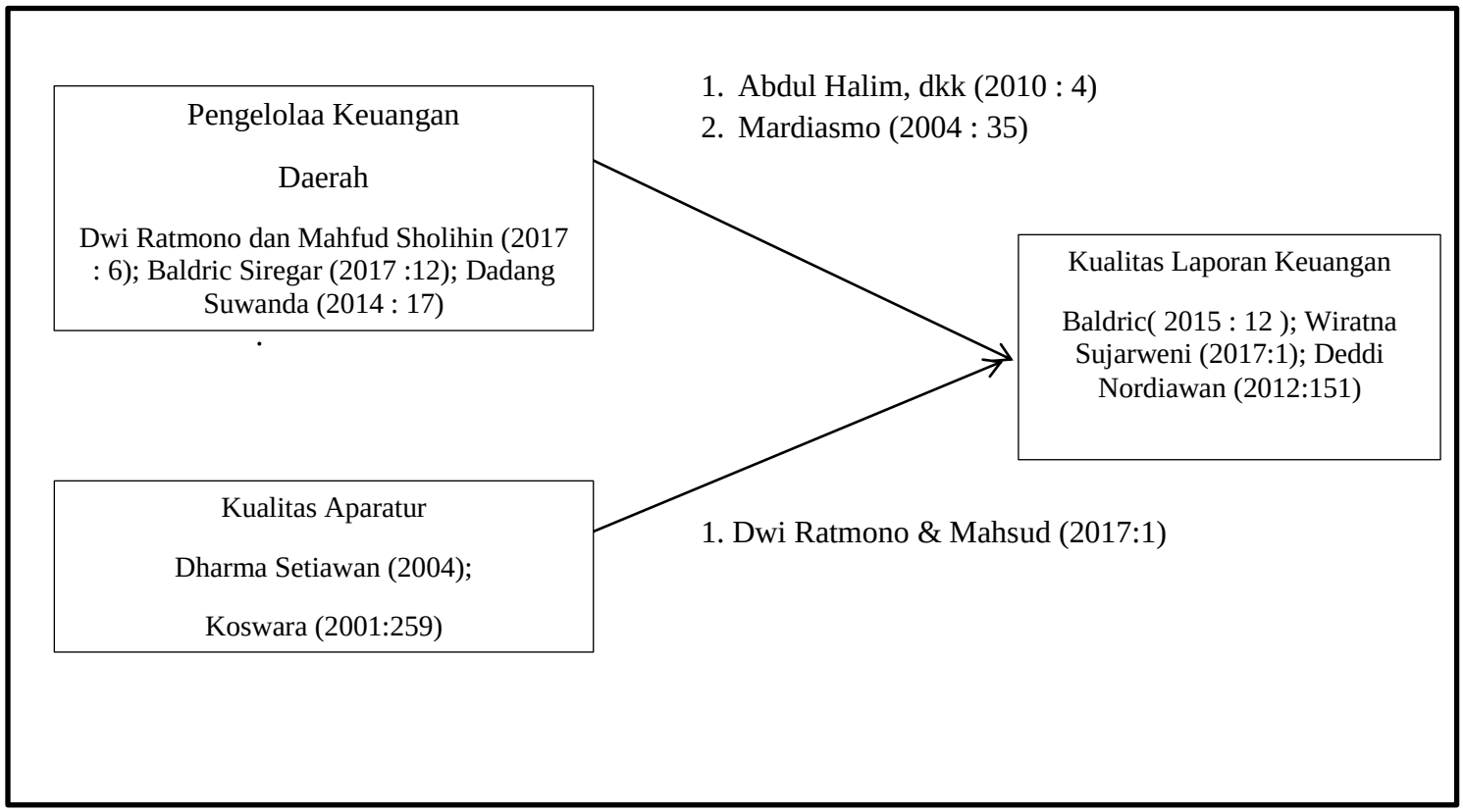
Selanjutnya Mardiasmo (2002:146) mengungkapkan bahwa Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa berkualitas dan baik.

Menurut Mahmud Daniel Kartika Adhidan Yohanes Suhardjo (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa standar kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, kualitas aparatur pemerintah daerah atau PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah) di bidang akuntansi (keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah.

Dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa aparatur pemerintah daerah merupakan perangkat penting dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian aparatur pemerintah daerah merupakan persyaratan penting dalam menyajikan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikiran dari penelitian ini dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut :

PARADIGMA PENELITIAN



Gambar 2.1

PARADIGMA PENELITIAN

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:54), berpendapat bahwa:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah ditanyakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah peneltian, belum jawaban yang empiris."

Hipotesis penelitian ini dapar diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus di uji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis adalah sebagai beruikut :

H_1 : Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

H_2 : Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan